



Ketua Pengurus Cabang (PC) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Jombang, Jawa Timur, Muhammad Hasan Ma'lum memaparkan, LPBINU bersama sejumlah relawan tanggap bencana menemukan perilaku masyarakat Jombang yang dinilai berpotensi mendatangkan bencana.

Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang masih acuh terhadap sampah. Mereka tak jarang membuang sampah tidak pada tempatnya, bahkan sungai pun kerap kali dijadikan alternatif pembuangan sampah.

"Hasil temuan kita di antaranya menemukan titik-titik lokasi di mana warga banyak membuang sampah bukan di tempat pembuangan sampah," katanya kepada *NU Online*, Kamis (2/5).

Temuan itu diakuinya sudah dikomunikasikan antar relawan juga telah dibawa ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. "Kala itu kami melakukan audiensi dan ditemui Wakil Bupati Jombang, Sumrambah," imbuhnya.

Ia mengatakan, perilaku masyarakat yang demikian akan berdampak serius, terutama saat musim hujan seperti saat ini. Beberapa daerah di Jombang yang saat ini sering terdampak banjir adalah akibat luapan air dari sungai yang tidak bisa dibendung. Luapan itu bisa terjadi salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

"Untuk itu kita berencana membangun atau menambah shelter bak sampah, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Di samping itu, dirinya mengajak kepada masyarakat untuk memulai menggalakkan bersih-bersih sungai. Hal ini sebagai edukasi masyarakat terhadap keberadaan sungai. "Kegiatan bersih sungai memang harus lebih digalakkan," timpalnya.

Pria yang kerap disapa Hasan ini menambahkan, hal lain yang menjadi perhatian para relawan adalah keberadaan jalan berlubang. Dirinya menyatakan, di beberapa jalan raya Jombang masih banyak ditemui jalan rusak. Kondisi ini pula tak jarang mengakibatkan kecelakaan, bahkan kadang merenggut nyawa pengguna jalan.

Namun demikian, khususnya terkait jalan berlubang yang ada di Jalan Provinsi, LPBINU dan relawan tidak punya wewenang. Melainkan wewenang pemerintah yang bersangkutan.

“Jika itu merupakan wilayah Jalan Provinsi maupun Nasional pihak Pemkab hanya bisa meminta dan mengajukan kepada instansi terkait yang punya kewenangan untuk segera diperbaiki,” pungkasnya. (**Syamsul Arifin/Muiz**)

Sumber: <http://www.nu.or.id>